

Trikonomika 2009

by Siti Maisaroh

Submission date: 05-Nov-2022 08:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1945291280

File name: 2009_jurnal_trikonomika.pdf (337.04K)

Word count: 7312

Character count: 48706

1 Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
E-mail: prasetyo.dr.eko@gmail.com

ABSTRACT

The aim of social and economy development are the same on the basic, that is to create prosperity for people, although the angle of view and approach can different. The People economy empowering as an effort to overcome poverty is economic development that is as well as social development. The aim of this article is to analyze the problem. The result of research shows that poverty is a one of serious social problems. Strategic model of people's economy empowering is only one of the best approach from economic side. The strategic model will be better if combine with approaching from another politic, culture, social-economy side. The result point that poverty arise caused by the existence of difference in capital and nature resource ownership also the lack quality of human resource. It means, that a poor society is poor because it is poor. Because of that, strategic model of people's economy empowering by the reinforcement of local resource potencial is one of the best and fast strategy that can be utilized to overcome poverty.

Keywords: empowering, local potecial, people economy, and poverty overcome.

PENDAHULUAN

1 Masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji di Indonesia adalah masalah pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemiskinan. Berbagai kajian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah dan tidak berkualitas, sehingga tidak banyak manfaatnya untuk mengurangi berbagai masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya bertumpu pada kekuatan dan potensi domestik (ekonomi rakyat), sehingga rentan terhadap gejala eksternal. Oleh karena itu, tekad pemerintah dengan kabinet bersatu Jilid I dan II telah merekomendasikan pembangunan yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*. Salah satu program pembangunan yang bertumpu pada potensi domestik yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* adalah program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat (*people's economy*), merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan ekonomi rakyat sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional yang harus dibangun, dilindungi, diberdayakan dan ditumbuhkembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Problemnnya karena ekonomi rakyat belum diberdayakan secara lebih nyata, maka wajar jika isu sentral pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan dan pengangguran dapat terjadi sebagai akibat tidak berdayanya ekonomi rakyat. Keberadaan ekonomi rakyat harus terus dibangun, dilindungi, diberdayakan dan ditumbuhkembangkan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas sebagai syarat cukup dalam pembangunan ekonomi, sudah pasti dibutuhkan pemberdayaan masyarakat secara lebih nyata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi

untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dapat dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial-ekonomi budaya masyarakat setempat). Selanjutnya, model strategi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat secara nyata tersebut dapat dilakukan melalui *enabling, empowering* dan *protecting*.

Konsep pendekatan umum yang sekarang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan, dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan, sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan dalam artikel ini dimaknai sebagai kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup ranah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan warga masyarakat setempat. Terdapat dua citra positif dalam konsep pemberdayaan ini yaitu; (1) memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa (dalam hal ini pemerintah atau peneliti) maupun kepada pihak yang mendapatkan kuasa (masyarakat miskin). Tipe inilah yang sering disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), dan (2) kekuasaan di dapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berdaya (tidak berkuasa) melalui perjuangannya sendiri menjadi lebih berdaya. Tipe ini yang sering disebut sebagai *self-empowerment* atau pemberdayaan sendiri. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebutlah yang digunakan sebagai dasar acuan dalam artikel ini.

Pokok masalah dalam artikel ini adalah bagaimana model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dapat digunakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan? Tujuan umum kajian penelitian ini adalah untuk membantu memberdayakan warga miskin agar mempunyai kemampuan yang kuat (tinggi) dalam melakukan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru di daerah sampel penelitian, sehingga mereka dapat lebih berperan serta aktif dalam kegiatan pembangunan. Caranya adalah membantu memberdayakan warga miskin agar lebih mampu meningkatkan pendapatan dan sekaligus mengurangi beban kehidupannya. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis sebab-sebab mengapa mereka miskin dan sekaligus mengkaji tindakan upaya-upaya strategis pemberdayaannya.

Secara teori sosial-ekonomi, masalah kemiskinan terjadi tidak begitu saja, melainkan ada sebab sekaligus akibat. Para akademisi pada umumnya lebih suka mempelajari kemiskinan dari sisi sebab-sebab kemiskinan, terutama kemiskinan struktural. Namun demikian, kita tetap harus memahami apa yang dimaksud kemiskinan itu sendiri dulu. Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan salah satu problem sosial-ekonomi yang amat serius. Sebelum bertindak lebih jauh maka, perlu diidentifikasi terlebih dahulu dengan cermat apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan itu sendiri, mengapa sebenarnya kemiskinan itu sendiri terjadi, bagaimana cara mengukurnya serta bagaimana cara mengatasinya. Miskin dapat diartikan sebagai posisi relatifnya, bukan miskin absolut, karena pendapatan mereka juga meningkat, namun posisi relatifnya tidak berubah. Bagi kelompok pengambil kebijakan, yang diperlukan adalah profil miskin. Mereka lebih membutuhkan ukuran garis kemiskinan untuk mengukur kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural.

Seseorang termasuk golongan miskin absolut jika hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan kultural terjadi sebagai akibat dari adanya budaya masyarakat dan etos kerja yang lemah. Kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur kebijakan pemerintah yang timpang sebagai akibat dari telah terjadinya ketidakadilan pada kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama.

Selanjutnya, kemiskinan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai dimensi. Kemiskinan yang disebabkan berkaitan dengan pembangunan dapat dibedakan pula menjadi kemiskinan subsisten (kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan sebagai akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan

perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan percepatan pertumbuhan perkotaan), kemiskinan sosial (kemiskinan yang dialami oleh para perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, serta kemiskinan konsekuensial, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya laju jumlah penduduk melebihi laju jumlah pendapatan nasional. Apabila ditelusuri lebih lanjut dari sebab dan akibatnya maka, dapat disimpulkan bahwa mereka miskin memang karena ia miskin. Logika berpikir secara makro ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, seorang ahli ekonomi pembangunan di tahun 1953, yakni; bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Selain itu, penyebab kemiskinan yang bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) tersebut juga telah diidentifikasi oleh; M.Sharp *et. al.* (1996). Ia mengidentifikasi tiga penyebab utama kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan terjadi sebagai akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah berarti produktivitas rendah, dan pada gilirannya upah atau pendapatannya rendah. Rendahnya kualitas SDM ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, kemiskinan terjadi sebagai akibat perbedaan akses dalam kepemilikan modal.

Ukuran garis kemiskinan yang sering digunakan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS dan Depsos, 2005:3). Jika setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhan setara 2100 kilo kalori tersebut per hari, maka ia dianggap miskin. Ukuran kemiskinan menurut Bank Dunia adalah pengeluaran setara US\$2 per individu per hari. Sementara itu, cara yang paling sederhana untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi yang ada.

Cara ini sering disebut dengan *Headcount Index*. Namun, cara ini dikritik mengandung kelemahan, karena mengabaikan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan pendapatan (*poverty gap*) digunakan untuk mengatasi kelemahan *headcount index* ini (Meier, 1995:26). Caranya, *poverty gap* yakni menghitung transfer yang membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga ke tingkat di atas garis kemiskinan, sehingga kemiskinan dapat segera dihilangkan.

Dalam penelitian ini, pendekatan tentang batasan pengertian kemiskinan yang digunakan secara operasional adalah cenderung menggunakan pendekatan kemiskinan dari Sharp (1996). Sementara itu, ukuran garis kemiskinan yang digunakan mengacu metode pendekatan yang telah digunakan oleh BPS. Dengan demikian, upaya-upaya tindakan strategi sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan dalam penelitian ini cenderung digunakan model strategi yang mampu mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh tiga hal tersebut, sedangkan salah satu model strategi yang diusulkan adalah **model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan**. Argumentasinya adalah karena kondisi riil kemiskinan yang terjadi di daerah sampel penelitian banyak disebabkan oleh terbatasnya akses kepemilikan sumber daya modal dan masih rendahnya kualitas SDM, sehingga menyebabkan ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya lahan. Sebagian besar warga di daerah penelitian hanya memiliki sebagian kecil tanah sebagai tempat tinggal dan ladang yang sempit.

Kemiskinan yang disebabkan karena keterbatasan kepemilikan akses terhadap sumber daya ini menjadi semakin sulit karena didukung oleh kondisi alam lingkungan sekitar yang relatif sulit dalam mengakses sumber daya air, baik air untuk keperluan kehidupan manusia maupun air untuk tanaman. Kesulitan terhadap akses air ini disebabkan karena letak daerah penelitian ini di lereng bukit pegunungan, maka sumber daya air hanya diperoleh dari air tadah hujan, dan belum ada air dari irigasi.

Dalam teori ekonomi Gunnar Myrdal, ditegaskan argumentasinya bahwa sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan di negara yang belum maju harus dilakukan dengan campur tangan pemerintah terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Kemudian tentang teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh ahli ekonomi neoklasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan (pemberdayaan)

atas industri-industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan dengan luar negeri. Tujuannya adalah bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk mengurangi beban si miskin. Selanjutnya, dasar teori inilah yang digunakan untuk mengkaji masalah kemiskinan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah banyak dilakukan di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh SMERU *Research Institute* (2002, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak berkualitas, sehingga hubungan erat ini menjadi tema sentral oleh Pemerintah Indonesia, yakni seperti yang tertuang dalam RKP sejak tahun 2004-2009 hingga kini dan lima tahun mendatang, pembangunan difokuskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, hasil penelitian SMERU, (2004) secara garis besar menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Oleh karena pada tahun 2009 pertumbuhan mengalami kontraksi, maka kemiskinan meningkat lagi, dan ini harus segera diatasi. Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, karena masih banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan. Artinya, manajemen kejutan (*management of shocks*) dan jaring pengaman sosial harus diterapkan. Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan. Pengurangan ketimpangan pendapatan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, sehingga sangat penting mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. Memberi hak atas properti dan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Seorang ahli ekonomi kesejahteraan pemenang nobel ekonomi (1998), Amartya Kumar Sen, dalam Jakti (2007) berpendapat bahwa jika sukses ekonomi suatu bangsa hanya ditentukan oleh pendapatan dan indikator-indikator kemewahan tradisional lainnya serta kesehatan finansial, maka tujuan utama bagi tercapainya kesejahteraan telah meleset atau gagal. Artinya, Amartya Sen, telah berjasa karena telah memasukan unsur kemanusiaan (humanis) dalam ilmu

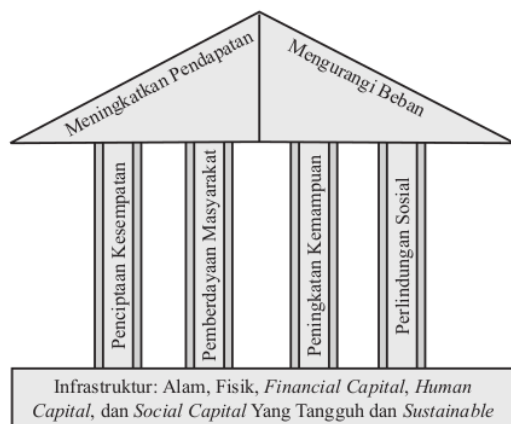
ekonomi, sehingga keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan perkapita penduduknya, tetapi juga memasukan indikator-indikator kesejahteraan.

Salah satu hasil penelitian Sen tentang kelangkaan pangan dan kelaparan yang dapat mengejutkan dirinya sendiri adalah bahwa bencana kelaparan tidak pernah muncul di negara yang bebas dan demokratis tetapi bencana kelaparan selalu terjadi di bawah keditaktoran militer dan pemerintah satu partai atau rezim kolonial lama. Hasil penelitian Sen ini barangkali masih relevan dan dapat dijumpai pada sebagian daerah di Indonesia yang kini masih dilanda dampak krisis ekonomi global 2008. Argmentasinya karena kebijakan pemberdayaan yang terjadi di Indonesia merupakan hasil keputusan politik, sehingga kemampuannya tergantung dari demokrasi politik yang terjadi. Sen juga menegaskan bahwa bencana kelaparan adalah ulah manusia akibat tak adanya hak atas informasi berupa pers yang bebas.

Inti daripada teori kesejahteraan Sen sebenarnya adalah bahwa; setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender, sehingga mereka dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang *capable*. Menurut Scott Brown (Jati, 2007), ahli ekonomi investasi, penghargaan terhadap Sen sebagai pemenang nobel ekonomi adalah justru mengangkat citra bidang studi ekonomi pembangunan, dan mengingatkan pada kita semua agar tidak mendewakan perekonomian pasar bebas yang terbukti kini telah gagal.

Berdasarkan pendekatan pemikiran dari kedua ahli ekonomi pemenang nobel (Myrdal, 1974 dan Amartya Sen, 1998 dalam Jati (2007) yang memperhatikan masalah kesejahteraan rakyat, melalui penelitian ini kedua pendekatan tersebut diramu kembali agar dapat mengentaskan masyarakat rawan pangan dan kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Karena pada dasarnya, kedua ahli ekonomi tersebut terdapat khususnya mengenai kesamaan lebih menekankan pentingnya sebuah proses dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Seperti halnya Stiglitz, pemenang nobel ekonomi 2001, kedua ahli ekonomi kesejahteraan tersebut (Myrdal dan Sen) juga bukan anti pasar, namun mereka sangat menyadari keterbatasan pasar dan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat mengikuti program nasional, maka model pendekatan program pengentasan kemiskinan ini juga disinergikan dan didasarkan pada UU No. 5/2000 tentang penanggulangan kemiskinan nasional yang terdapat empat pilar tersebut. Jika model program pengentasan kemiskinan ini dapat diibaratkan membangun sebuah rumah, maka pilar-pilar tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Model Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan mereka, maka perlu diciptakan berbagai kesempatan kerja dan berusaha yang dapat diperoleh dan digali dari potensi sumber daya lokal setempat. Masalah pengurangan beban berat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui bantuan dana BLT serta Raskin dan berbagai program lainnya. Namun, dalam penelitian ini lebih direkomendasikan pengurangan beban tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran akan arti pentingnya kehidupan sebagai manusia dan penguatan modal sosial masyarakat setempat, sehingga cara ini dipandang lebih mendidik secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan dengan pilar yang lain yakni pilar pemberdayaan masyarakat warga miskin daerah setempat melalui pendekatan *empowering*, *enabling* dan *protecting*. Satu pilar yang lain yakni pilar peningkatan kemampuan SDM warga miskin, dapat diberikan melalui pendekatan pemberian pelatihan-pelatihan atau *skill* tambahan, misalkan dapat diberikan pelatihan usaha kerajinan rumah tangga anyaman bambu yang dipandang paling potensial, mudah,

1 murah dan menguntungkan untuk dikembangkan di wilayah daerah penelitian ini (Prasetyo, 2008; Maisaroh, 2008).

1 METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus di daerah lereng pegunungan, dengan khalayak sasaran adalah warga miskin di wilayah kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta, yang lebih terpusat pada tiga desa kategori tertinggal (miskin) sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu di Desa Muntuk, Jatimulyo dan Temuwuh. Teknik pengambilan sampel wilayah didasarkan atas identifikasi kebutuhan analisis serta kondisi dasar potensi ekonomi warga dan wilayah desa yang bersangkutan. Dari ketiga wilayah desa sampel tersebut masing-masing diambil beberapa kelompok individu dan kelompok rumah tangga miskin sasaran sebagai sampel yang diambil secara *simple random sampling*. Pengambilan kelompok ini didasarkan atas kepemilikan potensi usaha yang mereka minati dan mampu melakukannya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yang dilengkapi dengan observasi dan angket. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan sebagian dilengkapi dengan teknik analisis kuantitatif.

Penelitian ini didisain dengan metode eksploratif dengan fokus kajian utamanya adalah masalah pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk kepentingan analisis tersebut digunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel utama dan sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan cara mengatasinya, serta beberapa variabel tingkat produksi dan variabel faktor produksi dari setiap usaha yang ditekuninya.

Teknik analisis diawali dari data sebab-sebab mengapa terjadi kemiskinan di daerah tersebut, selanjutnya dikaji lebih dalam potensi ekonomi produktif dan kreatif apa yang dapat diberdayakan dan ditumbuhkembangkan di wilayah desa tersebut serta diminati oleh sebagian besar warga miskin di daerah itu.

Berdasarkan identifikasi, ditemukan ada tiga sumber usaha ekonomi kreatif warga masyarakat yaitu usaha kerajinan bambu, kayu dan usaha dagang. Selanjutnya, baru disusun model prototipe strategi pemberdayaan ekonomi warga masyarakat miskin

khalayak sasaran yang dimaksud, beserta model strategi pengembangannya. Selain itu, dicari faktor pendorong/pendukung dan penghambat model tersebut. Kemudian, model prototipe ini diaplikasikan berdasarkan faktor pendorong dan potensi dasar yang mereka miliki sebagai pilar dasar pemberdayaan.

Tujuan dalam jangka panjang dari penelitian ini adalah dapat disusunnya model dasar strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih kredibel dan akuntabel serta mudah dan murah dilakukan sendiri oleh warga miskin khalayak sasaran secara mandiri dan berkelanjutan, baik bertaraf lokal maupun nasional. Kajian dalam jangka pendek adalah mengkaji dinamika ekonomi-sosial budaya dan politik masyarakat setempat, sebagai infrastruktur modal dasar strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud. Selanjutnya, model dasar strategi pemberdayaan ini diimplementasikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menemukan dan menganalisis dasar-dasar atau langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki yakni pengentasan kemiskinan. Peneliti berusaha menemukan kebaikan-kebaikan dan keburukan serta kekurangan di dalam aspek tersebut yang diselidiki dapat digunakan sebagai upaya-upaya pengentasan kemiskinan, selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif cara yang terbaik untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

Dengan demikian, tujuan umum kegiatan pelaksanaan program dalam jangka pendek yang harus dapat dicapai dan terukur adalah menciptakan berbagai kesempatan berusaha dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis pada potensi diri dan sumber daya lokal yang mereka miliki. Kegiatan ini, terutama ditujukan kepada para individu dan keluarga miskin sasaran yang selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan pendampingan yang cukup intensif sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakatnya, maka tujuan umum pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dalam jangka pendek ini dapat dijabarkan menjadi (1) menciptakan dan mengembangkan kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif terhadap para

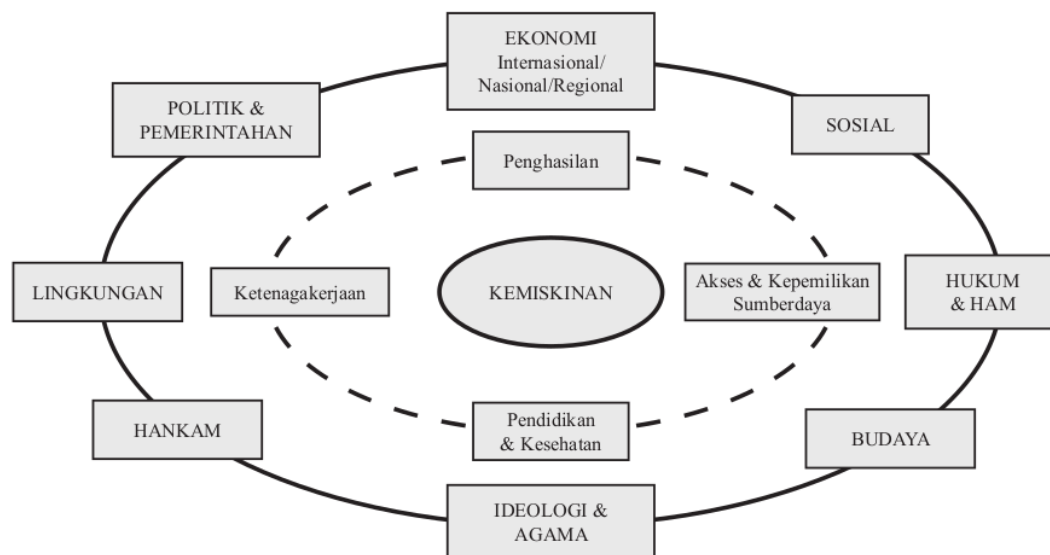
individu dan keluarga atau kelompok miskin sasaran, (2) meningkatkan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin sasaran yang terutama kepada kelompok keluarga prasejahteramelalui kegiatan bidang ekonomi kreatif-produktif yang mudah dan murah dilakukan oleh warga miskin sasaran ini, (3) meningkatkan mutu produk, disain produk, produktivitas dan daya saing usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga sasaran.

HASIL

Berdasarkan data pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 585.800 orang (17,23%) dengan garis kemiskinan pada Maret 2009 sebesar Rp. 211.978,00 per kapita per bulan, atau telah terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 194.830,00. Pada periode Maret 2008-Maret 2009 nampak indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 3,35 menjadi 3,52. Indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,92 menjadi 1,04. Kenaikan kedua indeks tersebut mengindikasikan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga sedikit melebar. Artinya, kenaikan garis kemiskinan tidak memiliki urgensi nyata dalam pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 47.051 Kepala Keluarga (KK) atau sebesar 18,91% dari sebanyak 248.753 KK. Jumlah tersebut didasarkan pada perhitungan dari 17 kecamatan yang masuk dalam BKK. S

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BKK tersebut adalah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM). Model PEKM merupakan program pengentasan kemiskinan dengan jalan pemberian modal kerja atau usaha berbunga lunak. Dalam metode PEKM ini, tidak semua KK miskin menerima bantuan modal, KK miskin yang mendapat prioritas bantuan adalah keluarga miskin dengan usaha produktif atau yang sedang mengembangkan usahanya. Rata-rata setiap KK memperoleh dana bantuan Rp. 1 juta. Sebenarnya, program PEKM ini telah digulirkan di Bantul sejak tahun 2004 dengan sumber dana dari APBD Pemkab Bantul.



Sumber: RPJPM, Kabupaten Bantul, 2007

Gambar 2. Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) di Bantul Yogyakarta

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, penyebab kemiskinan dan pengangguran di DIY adalah karena adanya kekurangan kebutuhan dasar, tidak mempunyai usaha produktif, tidak mempunyai ketrampilan, daerah yang kurang produktif, ketidakmampuan daerah tertinggal, serta tidak mempunyai modal. Menurutnya, peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 silam telah menambah angka penduduk miskin, bahkan angka kemiskinan di DIY di atas angka rata-rata nasional. Menurut Gubernur, sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan, sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat ke luar dari perangkap kemiskinan menuju keluarga yang mandiri.

Penelitian sebelumnya, pada tahun 1973 David Penny dan Masri Singarimbun telah menerbitkan hasil penelitiannya di Sriharjo, Imogiri, Bantul, tentang kemiskinan dan tekanan penduduk dalam bentuk monografi di Cornell University berjudul *Population and Poverty in Rural Java: An Economic Arithmetic from Sriharjo*. Monografi inilah yang menjadikan desa Sriharjo terkenal dan propinsi DIY

menjadi simbol kemiskinan di Indonesia, khususnya di Bantul. Sejumlah pengunjung dari dalam dan luar negeri telah berdatangan untuk mendalami strategi bertahan hidup (*survival*) dari penduduk perdesaan yang kemiskinannya parah seperti di Sriharjo ini. Pada saat ini, tahun 2008-2009 masih ada 5 (lima) kecamatan yaitu; Sanden, Imogiri, Dlingo, Sewon dan Kasihan, sebagai kategori kecamatan yang tergolong masih banyak jumlah penduduk miskinnya, dan berdasarkan jumlah warga penerima raskin pada tahun tersebut relatif tetap.

Membebaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul dari lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) masih membutuhkan waktu yang cukup lama, paling tidak butuh sekitar 6 tahun, (Bupati Bantul, Idham Samawi, 2008). Dengan asumsi, setiap tahun angka kemiskinan bisa dikurangi sesuai target, yaitu 5 persen. Sedangkan, angka kemiskinan di Bantul pasca gempa bumi 27 Mei 2006 sebesar 28,11 persen atau 81.398 KK. Dua tahun kemudian, turun ke angka 67.589 KK.

Dalam rangka akselerasi terwujudnya kesejahteraan rakyat Bantul, maka program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD II Kabupaten Bantul tahun 2008-2009. Program ini bertujuan untuk

menurunkan angka kemiskinan menjadi 21,90% pada tahun 2010. Pemkab telah bertekad untuk membangkitkan semangat membangun kembali Kabupaten Bantul melalui Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan (Gerbang Daya) ProjoTamansari. Khususnya dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui program validitas data keluarga miskin, mengurangi beban keluarga miskin dan pemberdayaan keluarga miskin.

Sementara itu, untuk membangkitkan semangat seluruh perangkat desa dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, Pemkab Bantul saat ini telah membuat terobosan di antaranya dengan memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinan tertinggi. Kerja sama dengan Bakosurtanal ini diharapkan dapat menghasilkan Peta Kemiskinan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan keluarga miskin tersebut ternyata membantu memudahkan pengentasan kemiskinan di wilayah daerah Kabupaten Bantul. Sebagai contoh, data pemetaan ini berisikan pendataan secara lengkap termasuk identitas dan potensi penduduk miskin, pekerjaan kepala keluarga, status pendidikan anak, pekerjaan anggota keluarga yang berusia di atas 16 tahun, sampai kepada data keluarga yang pernah menerima bantuan.

1 PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator permasalahan dapat dilihat dari aspek penentu yaitu; aspek pangan, sandang, dan papan. Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan tidak lebih dari Rp. 484.740,00. Selanjutnya, aspek pendukung dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, kekayaan, akses air bersih, akses listrik, dan jumlah jiwa dalam keluarga. Jika jumlah anggota dalam keluarga (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih sementara penghasilan perbulan tidak lebih dari itu, maka termasuk KK miskin sekali, dan KK miskin jika diantara garis kemiskinan terbaru Rp. 211.978,00 per kapita per bulan.

Berdasarkan data keluarga miskin pada wilayah daerah kecamatan penelitian Dlingo, terdapat 3.298 KK miskin dan 120 KK miskin sekali. Sebagian besar dari KK miskin tersebut, nampak tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK dengan baik. Akses listrik pun belum dinikmati dengan baik oleh 631 keluarga. Sementara itu, wilayah kecamatan yang pada saat ini banyak warga miskinnya adalah Kecamatan Sewon dan Imogiri.

Pada Kecamatan Sewon sebanyak 6.310 KK miskin dan 221 KK miskin sekali dan di Kecamatan Imogiri terdapat 6.253 KK miskin dan 268 KK miskin sekali.

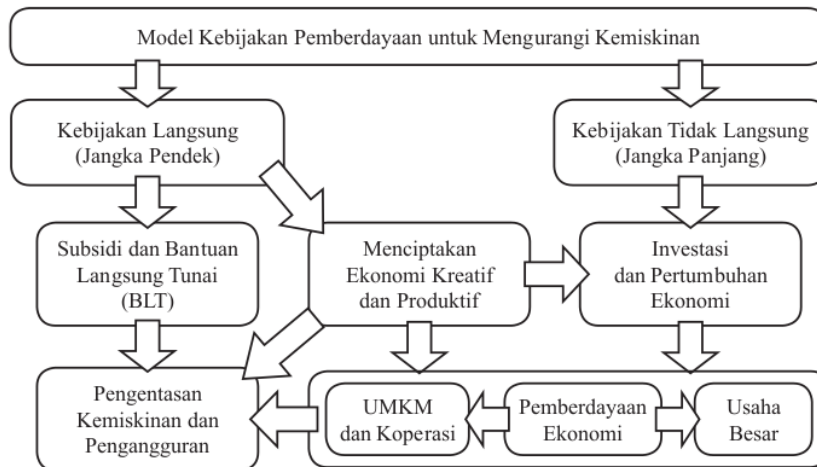
Selain itu, masih banyak program-program yang hingga ini sebenarnya masih tetap konsisten ikut menangani masalah kemiskinan termasuk program pemberdayaan keluarga (Posdaya) bersama Yayasan Damandiri, Program KB, Posdaya berbasis Posyandu atau Masjin dan sebagainya. Program-program tersebut intinya untuk membantu pengentasan kemiskinan di wilayah Bantul.

1 Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan, rawan pangan dan ketimpangan distribusi pendapatan serta pengangguran pada hakekatnya merupakan masalah pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berbagai upaya pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki potensi ekonomi produktif dan ekonomi kreatif harus segera dilakukan secara berkelanjutan, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Upaya-upaya pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas khususnya melalui pembangunan dan pemberdayaan UMKM. Selama ini, model kebijakan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan di Indonesia, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, secara mikro program pemberdayaan ekonomi rakyat yang langsung tetapi berdampak lebih luas dalam jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih jarang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para peneliti sebelumnya. Sebagian besar kebijakan yang diberikan secara langsung bukan berupa bagaimana caranya melainkan hasilnya, sehingga tetap berdampak dalam jangka pendek saja. Kebijakan langsung pemberian BLT adalah contoh kebijakan jangka pendek yang tetap berdampak hanya dalam jangka pendek.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan potensi ekonomi lokal yang produktif dan kreatif merupakan model strategi dasar kebijakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek. Namun, hasilnya jika dikembangkan secara berkelanjutan dampaknya akan lebih luas dalam jangka panjang, dan bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.



Gambar 3. Model Strategis Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk memenuhi kepentingan di atas, maka model dasar strategi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengurangi kemiskinan dalam Gambar 3. perlu terus dimodifikasi. Kebijakan langsung bukan hanya untuk BLT dan subsidi saja (seperti yang selama ini dilakukan), melainkan pula untuk dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan potensi ekonomi produktif dan ekonomi kreatif lokal yang telah ada di wilayah desa miskin yang bersangkutan. Dalam jangka panjang, strategi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif ini akan menjadi UMKM mandiri yang dapat lebih mampu menghidupi individu atau warga miskin di wilayah daerah yang bersangkutan, baik melalui keluarganya maupun di dalam masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Hasil sinergi penelitian ini menunjukkan pula bahwa kebijakan program Raskin merupakan program bantuan bersubsidi dari pemerintah bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk memenuhi sebagian hak dasar kebutuhan pangan, dengan harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Dampak selanjutnya capaian Ketahanan Pangan Keluarga miskin ini makin baik, karena di-backup dengan program pemberdayaan masyarakat yang produktif, yang diampu oleh SKPD lewat pelatihan-pelatihan, kursus ketrampilan, pembekalan manajemen dan diakses dengan penguatan modal baik berupa hibah maupun pinjaman lunak. Perpaduan program

kebijakan dalam jangka pendek tersebut ternyata lebih dapat sukseskan program pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran di wilayah daerah penelitian Kabupaten Bantul secara signifikan.

Model Pemberdayaan Industri Kerajinan Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

Keberadaan industri (kerajinan) rakyat, merupakan salah satu model atau pilar utama ekonomi rakyat di Kabupaten Bantul. Karena industri kerajinan rakyat, telah mampu memberikan nilai tambah bagi gerak maju ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya melalui pariwisata. Hasil penelitian menegaskan bahwa ragam kerajinan, dengan keunikan khas daerah, telah menjadi daya tarik tersendiri, yang ikut mendongkrak angka kunjungan wisata. Selain itu, industri kerajinan rakyat tersebut, ikut memberikan sumbangsan yang signifikan dalam memperluas lapangan kerja, dan dengan sendirinya menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Data statistik ketenagakerjaan menunjukkan bahwa; sekitar delapan belas persen rakyat Bantul, menggantungkan hidupnya dari gerak majunya industri kerajinan tersebut. Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah bertekad untuk terus memperkuat kinerja sektor industri kerajinan rakyat ini. Perbaikan kesejahteraan perajin, berarti perbaikan kualitas hidup lebih dari 18,91 persen rakyat Bantul.

Tabel 1. Data Potensi Desa di Kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta

Kecamatan Dlingo	Potensi Lokal Yang Dimiliki		Tingkat Pengembangan	
Desa/Kelurahan	Umum	Potensi Pengembangan	Prakarsa	Kategori
Desa Terong	Sedang	Industri kecil dan kerajinan	Swadaya	Mula
Desa Dlingo	Sedang	Jasa dan Perdagangan	Swakarsa	Mula
Desa Temuwuh	Sedang	Jasa dan Perdagangan	Swakarsa	Mula
Desa Muntuk	Sedang	Industri kecil dan kerajinan	Swakarsa	Mula
Desa Mangunan	Sedang	Jasa dan Perdagangan	Swakarsa	Mula
Desa Jatimulyo	Sedang	Jasa dan Perdagangan	Swakarsa	Madya

Sumber: Potensi Ekonomi Lokal Wilayah Dlingo Kabupaten Bantul, 2007

Pemberdayaan industri kerajinan sebagai pilar ekonomi rakyat di daerah sampel penelitian pada Tabel 1., tentu saja dapat ditransformasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah daerah kecamatan penelitian tersebut pada khususnya dan seluruh wilayah daerah kecamatan lain di Kabupaten Bantul pada umumnya. Keberadaan industri kerajinan rakyat ini bermakna luas baik secara sosial, politik ekonomi dan budaya. Keberadaan industri kerajinan ini akan sulit untuk menjadi pilar ekonomi rakyat jika tanpa pemihakan atau pemberdayaan yang nyata. Oleh karena itulah, salah satu derivasi utama dari model pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana mempertemukan antara kekuatan produktif masyarakat dengan seluruh sumber daya yang ada, sehingga dari sana terbangun suatu produktivitas nasional yang mampu membawa rakyat dalam hidup yang lebih baik dan lebih mulia.

Pada titik inilah dibutuhkan suatu model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu menggerakkan peningkatan produksi yang berimpit dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks industri kerajinan rakyat pada daerah penelitian di Kabupaten Bantul, tantangan yang ada, memang jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena industri yang berbasis pada kekuatan rakyat, pada dasarnya adalah himpunan dari rumah-rumah produksi dalam skala rumahan, yang jauh dari sentuhan teknologi, baik teknologi produksi, desain, manajemen ataupun transaksi. Pada satu sisi, industri rakyat, memiliki kekuatan yang sangat hebat, terutama jika dilihat dari segi kreativitas, daya hidup dan keberanian untuk menembus risiko. Namun, pada sisi yang lain, industri rakyat, kerap kali terbata-bata ketika berhadapan dengan logika pasar global. Tanpa sentuhan pemberdayaan, proteksi dan subsidi,

maka yang “kecil” akan mudah digeser oleh yang besar, bahkan dihilangkan atau mati. Dalam kondisi demikian, produktivitas pastilah tidak berimpit lagi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika terjadi demikian, maka justru disinilah letak tugas penting peneliti dan Pemerintah daerah setempat agar cepat bertindak untuk memberdayakan keberadaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama keberadaan industri kerajinan ini adalah terletak pada pasar yang berkualitas. Tantangan strategis dalam membangun suatu produktivitas yang berkualitas, yakni produktivitas yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, adalah bagaimana mendekatkan antara produsen (perajin) dengan konsumen (*buyer*). Hal ini, memang bukan pekerjaan mudah, mengingat jaringan pasar telah terbentuk dan mewujudkan sebagai *market structure* dan *market conduct* suatu jaringan pasar yang kurang ramah dengan industri kerajinan rakyat. Ketika ada upaya mendekatkan produsen dan konsumen, dapat dipastikan akan ada upaya yang menghambat gerak majunya dan tentu pula ada yang mendukung. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini telah berusaha membantu mendekatkan produsen dan konsumen, misalkan melalui bentuk pengadaan Pasar Seni Gabusan (PSG). Namun demikian, Pemerintah daerah sendiri telah menyadari bahwa keberadaan PSG bukanlah akhir dari perjuangan memperkuat posisi tawar perajin, melainkan awal dari jalan panjang yang harus dilalui bersama, untuk membangun suatu pasar yang berkualitas.

Pasar berkualitas adalah pasar yang mampu meningkatkan transaksi sehat, yakni transaksi yang memberdayakan, memperkuat dan meningkatkan pendapatan perajin, serta pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan perajin. Tentu saja suatu pasar berkualitas membutuhkan daya dukung infrastruktur yang cukup

memadai, baik infrastruktur yang menopang produksi dengan standar mutu, transaksi berskala ekspor dan promosi. Pasar jenis ini hanya mungkin dibangun oleh big capital, dan tidak mungkin dibangun oleh industri kerajinan rakyat. Di sinilah sebenarnya peran model strategis pemberdayaan yang hendak dimainkan oleh PSG. Sebagai pasar, PSG tidak saja sebagai tempat transaksi berjalan, melainkan juga memainkan peran promotif, mediasi, dan sekaligus sentral pemberdayaan. Produk-produk perajin kecil yang selama ini tidak dapat mengakses pasar global, atau tidak mampu mengakses ruang-ruang pameran yang berkualitas, diharapkan dapat “didongkrak” dan pada akhirnya dapat menjadi komoditi unggulan yang mampu membawa keuntungan bagi rakyat.

Namun demikian, pembangunan dan pemberdayaan suatu pasar berkualitas, tentu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Untuk itu; dibutuhkan waktu, ketekunan, kerja keras dan kontinuitas semua pihak, agar kondisi yang dimaksud dapat dicapai. Diakui pula bahwa usaha yang dilakukan masih jauh dari memadai, terutama jika dikaitkan ketatnya persaingan usaha. Oleh sebab itulah, kerja sama dengan semua pihak amat dibutuhkan, terutama berkait dengan perluasan akses dalam permodalan, teknologi, dan pasar.

Pada sisi yang lain, tetap masih diharapkan dapat terus bangkitnya kesadaran baru di kalangan perajin, terutama untuk meningkatkan etos kerja produksi, terus berkreasi secara kreatif untuk menciptakan produk berkualitas, produktif-inovatif dan semakin mampu membangun kemandirian. Saling sinergi, antara rakyat (perajin), pasar berkualitas dan pemerintah, tentu saja akan mampu membangun industri kerajinan rakyat, yang berciri gerak tumbuh serta berimpit antara produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena itu, model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditandai semakin menguatnya keberadaan industri kerajinan rakyat merupakan jalan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat serta kejayaan bangsa di masa depan.

Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Untuk Pengentasan Kemiskinan

Tantangan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah saat ini dirasakan cukup berat. Pertama, upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat desentralistik, *bottom-up* dan juga lokal-spesifik. Artinya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan pemerintah-masyarakat lokal sesuai

kondisi setempat dengan mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan komprehensif. Alasannya karena merekalah yang lebih tahu potret kemiskinan di daerahnya dan ini menjadi pekerjaan rumah pokok mereka. Kedua, upaya pengentasan kemiskinan dalam era otonomi daerah juga harus diikuti dengan perbaikan akses penduduk miskin terhadap faktor produksi. Oleh karena itu, model strategi kebijakan pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan harus relevan dengan kenyataan.

Selanjutnya, model strategi pemberdayaan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan tersebut harus mempunyai minimal tiga pilar utama, pertama pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yang memungkinkan kaum perempuan untuk bisa berpikir rasional dan mampu menghasilkan ide-ide cemerlang yang bisa diterapkan sebagai kegiatan nyata di lapangan. Model strategi pemberdayaan ini sejalan dengan permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh lemahnya kualitas SDM, sehingga kemampuan dan kualitas SDM harus ditingkatkan terlebih dulu. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan sosial sebagai upaya pengurangan beban, dan pilar ketiga penciptaan kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa model strategi lain yang cukup unik ditemukan di daerah penelitian adalah adanya pengembangan sistem ekonomi moral (*moral economy*), yaitu aturan main hidup berekonomi yang tidak semata-mata mengejar efisien, tetapi tetap efisien dan sekaligus adil. Inilah keadilan ekonomi yaitu aturan main hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada etika, dan prinsip dasar bisnis “*tuna satak bathi sanak*” yang pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia. Artinya, hasil penelitian ini mendukung pendapat John Rawls dalam *The Theory of Justice* yang telah menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil adalah yang dapat menjamin hasil paling besar bagi mereka yang paling miskin atau tertinggal.

Dengan kata lain, untuk masyarakat Bantul Yogyakarta, khususnya pada daerah penelitian, bahwa berkembangnya ekonomi rakyat terjadi berkat kebijakan pemerintah setempat yang memihak pada rakyat atau oleh si miskin sendiri yang mampu membuktikan telah berkembangnya sistem ekonomi moral yang dimaksud secara kreatif. Hasil penelitian

justru menjelaskan bahwa, ekonomi rakyat di daerah penelitian ini lebih dapat berkembang sebagai upaya pengentasan kemiskinan karena didasarkan oleh kreativitasnya si miskin sendiri dan bukan oleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat sendiri antusias menyambutnya dengan modal dasar yang mereka miliki, yakni modal sosial (*social capital*) masyarakat yang mampu terus dikembangkan hingga kini dan mendatang.

Hasil penelitian yang lebih menarik adalah bahwa warga masyarakat Yogyakarta khususnya di daerah penelitian, sebenarnya “tidak pernah merasa miskin”, karena mereka tidak terlalu mementingkan dan memomersatukan kehidupan materi dengan pemupukan harta, melainkan mereka lebih senang menetapkan pendidikan dan kesehatan pada urutan pertama dan utama dalam pengeluarannya, sehingga hasilnya kualitas SDM-nya tetap tinggi. Artinya, model strategi pengentasan kemiskinan dengan cara lebih mengutamakan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan-latihan ternyata lebih mampu mengurangi “kemiskinan yang sebenarnya secara ekonomi”. Masalah kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, maka modal dasar utamanya adalah modal sosial masyarakat itu sendiri.

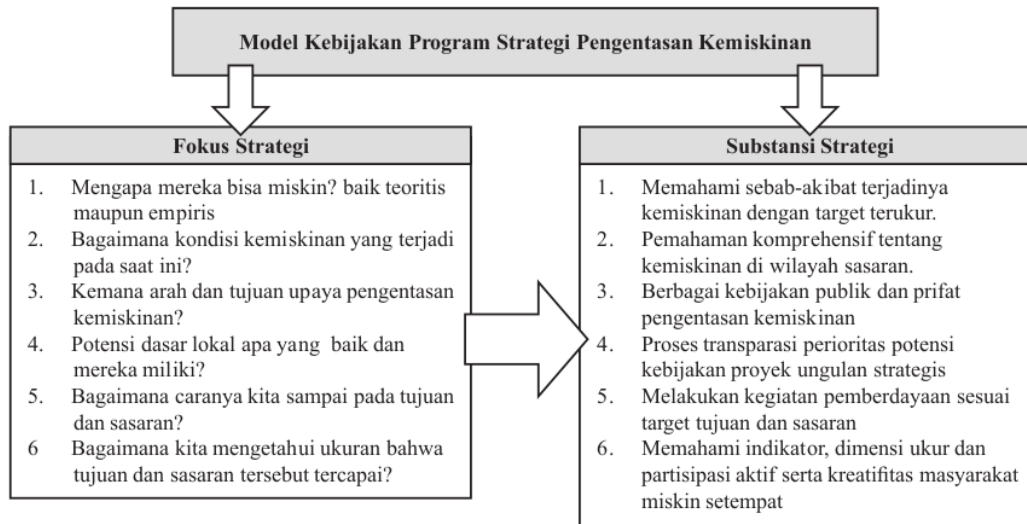
Karakteristik kehidupan warga di Kecamatan Dlingo Bantul secara geografis yang terletak di Kabupaten Bantul paling timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, adalah relatif gersang dan miskin. Potensi yang ada di Kecamatan Dlingo adalah pada sektor industri kayu, anyaman, dan potensi wisata bentang alam berupa pegunungan. Dlingo memiliki enam desa, dan karakteristik desa yang dimilikipun beraneka ragam antara lain. Desa Muntuk, memiliki potensi kerajinan anyaman bambu yang sudah menembus pasar nasional maupun internasional, di samping juga potensi wisata pemandangan alam pegunungan di kawasan wisata Nganjir. Desa Jatimulyo secara umum tidak mengalami pertumbuhan secara menonjol, baik dari sisi ekonomi, politik, dan potensi lokal yang ada, akan tetapi di wilayah ini terdapat lokasi-lokasi wisata ritual yang selalu ramai dikunjungi wisatawan luar daerah seperti Sendang Banyu Urip dan Pohon Jatikluwih, sehingga ciri umum desa ini terletak pada warisan budaya yang religius dari leluhur. Wilayah desa miskin dari ketiga desa adalah desa Temuwuh. Karakteristik desa ini yang paling menonjol adalah

pada persaingan ekonomi tepatnya secara ekonomi masyarakat sudah mulai sadar akan potensi desanya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berdagang dan berusaha menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil menengah di daerah ini mulai berkembang dan mulai menembus pasar nasional. Komoditi yang paling mendominasi adalah industri kayu/meubeler berupa daun pintu, meja, kursi dan barang-barang dari kayu, di samping industri pengrajin bunga palsu, serta rak-rak kayu sengon.

Berdasarkan identifikasi masalah potensi wilayah desa penelitian yang bersangkutan tersebut, maka model strategi pemberdayaan warga masyarakat di masing-masing desa jelas berbeda. Namun secara umum memiliki pola dan karakteristik yang sama yakni, dilihat dari sudut pandang kreativitas warga yang masih mungkin untuk diberdayakan dengan baik. Secara umum model dasar strategis pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah tersebut masing-masing harus dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu upaya atau alternatif yang terbaik untuk pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut.

Beberapa strategi dasar yang harus dilakukan melalui penguatan ekonomi mikro lokal yang produktif dan kreatif untuk merealisasikan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan adalah adanya kerjasama mutualisme antara semua elemen yang ada untuk bisa mendorong ekonomi mikro lokal ini agar bisa menjadi salah satu tembok dalam menghindari kemiskinan. Model strategi ini bisa dilakukan apabila ketiga elemen tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dalam pembangunan, misalnya dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi mikro yang berbasis kekuatan potensi lokal yang kreatif dan produktif tadi.

Kebijakan pemerintah harus bisa menciptakan regulasi yang pro ekonomi lokal yang kreatif dan produktif, maka peraturan daerah harus bisa mendorong kekuatan ekonomi lokal, dan bukan sebaliknya. Karena itu, harus diciptakan kekuatan ekonomi mikro sebagai pilar utama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang semakin nyata. Seluruh elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat yang diwakili oleh LSM harus bisa membuat lembaga keuangan mikro sendiri yang kuat, akuntabel, dan mengedepankan distribusi keadilan dalam prosesnya. Tujuannya, supaya usaha mereka terhindar dari rentenir yang nota benanya dapat mengeksploitasi usaha mikro dengan bunga tinggi.



Gambar 4. Subtansi Strategis Pemberdayaan Potensi Unggulan untuk Pengentasan Kemiskinan

1
Selanjutnya, lembaga keuangan mikro tersebut berkompetisi dan berkolaborasi bisnis dengan lembaga keuangan informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro usaha masyarakat miskin, dan pemberian pinjaman jangan berbelit-belit, sehingga usaha mikro mereka merasa tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya.

Secara substansi, beberapa fokus strategi di atas untuk lebih sederhananya dapat dirumuskan dalam sebuah model strategi pemberdayaan seperti Gambar 4.

KESIMPULAN

Konsep pemberdayaan telah mengubah konsep pembangunan ekonomi dan sosial yang sekaligus mampu menjelaskan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi dasar ekonomi mikro yang produktif-kreatif karena didasari oleh sumber daya warga miskin yang kreatif. Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam pengentasan kemiskinan. Apabila pemberdayaan sebagai model strategis pengentasan kemiskinan, maka ia harus menjadi proses multidimensi dan multi segi yang mampu memobilisasi berbagai aspek atau unsur sumber daya serta kapasitas dan potensi masyarakat yang bersangkutan, sehingga pemberdayaan tidak hanya sesuatu teoritis, melainkan dapat menjadi alat terbaik sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagai salah

satu contoh model strategi pemberdayaan yang baik adalah melalui pemberdayaan ekonomi industri kerajinan rakyat sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan perajin yang berarti pula pengurangan kemiskinan masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotim, E.E. dan Handayani, A.D. 2001. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah. *Jurnal Analisis Sosial*, 6(3).
- Crook, Nicole. 1999. Population and Poverty in Classical Theory. *Journal of Population Studies*, 50(2):173-185.
- Dasgupta, Partha. 2003. World Poverty : Causes and Pathways. *World Bank's Annual Bank Conference on Development Economics*.
- Faturochman, et. al., 2007. *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.
- Friedman, John. 1996. Rethinking Poverty: Empowerment and Citizen Rights. *International Sosial Science Journal*. 148 (June).
- Jati, Dorajatun Kuntjoro. 2007. *Esai-Esai Nobel Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media.
- Jitsuchon, Somchai. 2001. What is Poverty And How To Measure It?. *TDRI Quarterly Review*, 15(3).
- Listianingsih, Umi. 2004. *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM dan USAID

- Maisaroh, Siti. 2008. Peningkatan Produksi Kerajinan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1).
- Meier, Gerald M. 1995. *Leading Issues in Economic Development* (6th edition). Oxford: Oxford University Press.
- Mujiyadi. B. dan Gunawan. 2000. Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri). *Informasi*, 5(1).
- Ozawa, Martha, N. 2001. Economic Class and Redistribution of Income through Spouse Benefits under Social Security. *Journal of Poverty*, 5(3).
- Prasetyo, P. Eko. 2008. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Akmenika*, 1.
- Prasetyo, P. Eko, Marimin, dan Siti, Maisaroh, 2009, Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Dlingo Bantul Yogyakarta, *Laporan Penelitian DIPA*, Unnes, Semarang: LPPM Unnes.
- Sharp, Ansal M., et.al. 1996. *Economics of Social Issues* (12rd edition). Chicago: Richard D. Irwin.
- Suharto, Edi, 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Bandung Press.
- Yasa, I.G. dan W. Murjana. 2008. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Propinsi Bali. *Jurnal Manajemen dan Fiskal*, 2 (2).

Trikonomika 2009

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE



kolepivangoblog.wordpress.com

Internet Source

14%

14%

★ kolepivangoblog.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On